

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEMESTER I TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada periode semester I anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN SUMEDANG, /

ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670918 198703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Pemasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Perencanaan Strategis.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja.....	9
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	24
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Perbaikan Kedepan.....	35
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bermegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

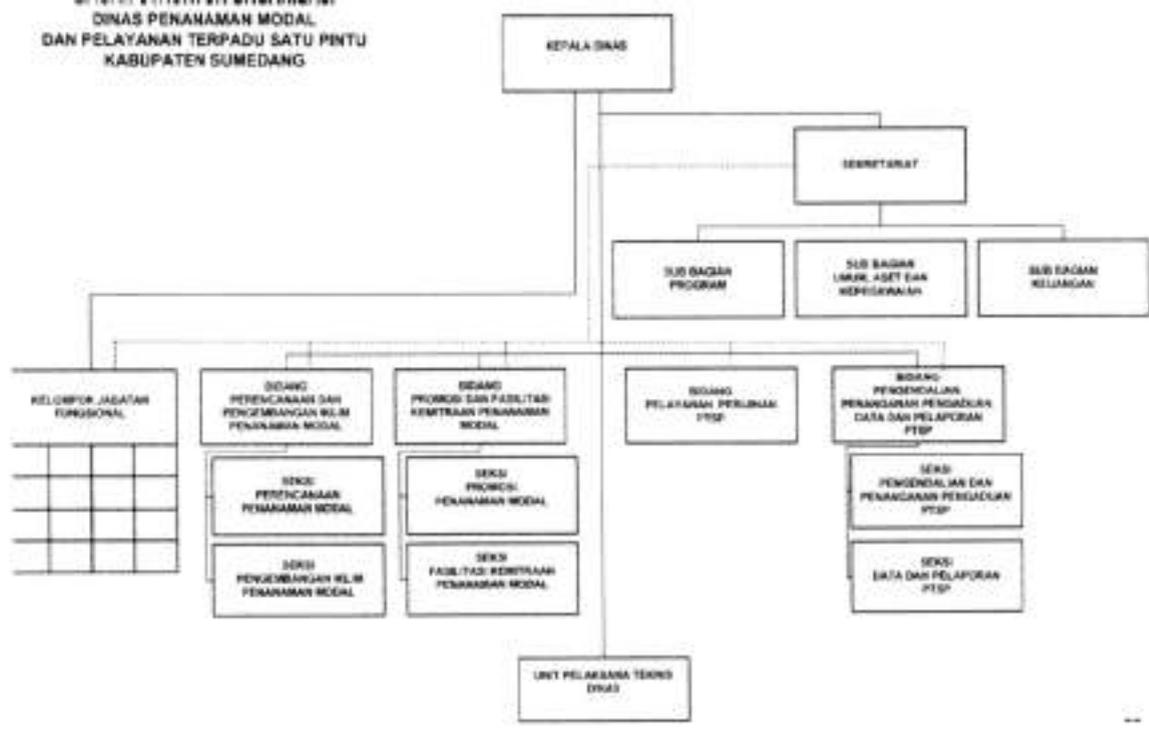
- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG**



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan RTRW dan RDTR Kabupaten Sumedang serta dokumen perencanaan teknis lainnya terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi khusus
2. Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Kesiapan Implementasi Terbitnya Pp 24 Tahun 2018 Terkait Online Single Submission (OSS) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Yang Pasti, Cepat Dan Mudah.
3. Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang mempunyai fungsi meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Penanaman Modal. Majunya suatu daerah tidak bisa lepas dari peran penanaman modal, penanaman modal menjadi hal yang sangat penting karena merupakan modal utama dalam

menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Adanya investasi akan mendatangkan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang hadir sebagai mitra investor dalam memperoleh perizinan dengan kepastian waktu dan biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke-3 (tiga) yakni Misi "Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal". Dan Ke-4 (empat) yakni Misi " Menata Birokrasi pemerintah yang

responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat". Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang
Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan	Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
		Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
2.	Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan	Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
		Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah
		Program Peningkatan Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
		Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal Dan PTSP

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.927.390.608.000,-	Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	88,31	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2023
1.	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.106.170.000.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	88,31	90,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 Indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang sebesar 264,56 dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan sebesar 98,69 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.927.390.608.000,-	191.946.560.570,59	9,96%	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	88,31	84,24	95,39	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Semester I Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut .

1) Indikator Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah RI. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor secara berkala. Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi investor yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, setiap pelaku usaha dengan modal yang ditanamkan di Indonesia, diwajibkan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja

Target Kinerja Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.927.390.808.000,- berdasarkan data LKPM sampai dengan Semester I Tahun 2022 Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Sebesar Rp 191.946.560.570,59 atau terealisasi sebesar (9,96%) (KINERJA SANGAT RENDAH). Target Kinerja Tidak Tercapai.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.927.390.608.000,-	191.946.560.570,59	9,96%	Sangat Rendah

Sumber : DPMPTSP Sumedang Tahun 2022

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi dan capaian realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 masih di bawah tahun sebelumnya. Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebesar Rp 4.249.320.950.689,- atau terealisasi sebesar 264,56% sedangkan realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sampai dengan Semester I terealisasi sebesar RP 191.946.560.570,59 atau terealisasi sebesar 9,96%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah nilai investasi di Sumedang
Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.606.158.840.000,-	4.249.320.950.689,-	264,56%	1.927.390.608.000,-	191.946.560.570,59	9,96%	Realisasi dan capaian kinerja menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam Renstra Tahun 2018-2023, target jangka menengah nilai investasi Sumedang adalah sebesar Rp 2.505.607.790.400,- dan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 191.946.560.570,59 atau sebesar 7,76%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang
Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja		Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Semester I Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022
Jumlah	Nilai	2.505.607.790.400,-	191.946.560.570,59	7,76%
Investasi	di			
Sumedang				

d. Perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari - Juni Tahun 2022 yang direalisasikan oleh para investor di Kabupaten Sumedang mencapai Rp 191.946.560.570,59

Perkembangan realisasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Rp sampai dengan Tahun 2022 berada diatas rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Tingkat nasional mengalami peningkatan sebesar 26,81%, Provinsi Jawa Barat sebesar 9,72% dan Sumedang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 75,66%.

Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp 1.229.442.500.000,- Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.180.357.950.064,51 Tahun 2021 Terealisasi sebesar Rp 4.249.320.950.682,- dan Semester I Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 191.946.560.570,59

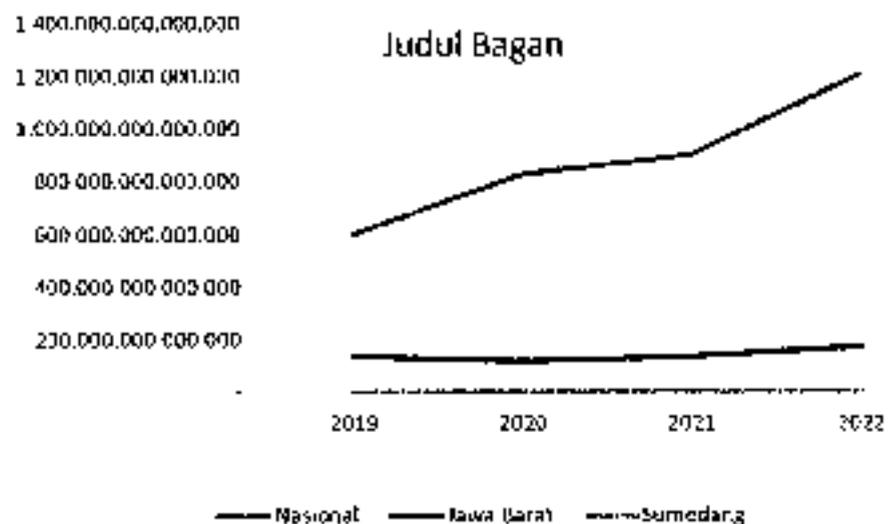
Realisasi investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Rp 137.069.000.000.000,- Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp

120.429.949.751.020,-, Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 136.126.809.043.668,- dan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 174.577.618.128.964,-

Pada tingkat Nasional, realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp 601.300.000.000.000,- Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp 826.300.000.000.000,- dan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 931.000.000.000.000,-. Dan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 1.207.200.000.000.000,-

Perbandingan realisasi investasi tahun 2019 sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.



e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Target kinerja Indikator Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp 1.927.390.608.000,- dan realisasi sampai dengan semester I Tahun 2022 adalah Rp 191.946.560.570,59 atau capaian kinerja sebesar 9,91%. Realisasi investasi tersebut bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM

RI yang disampaikan perusahaan/investor untuk setiap aktivitas investasi yang dilakukan dalam kurun waktu Semester I Tahun 2022. Target kinerja tercapai.

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah investasi di Kabupaten Sumedang didukung oleh dua program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Investor. Capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupten Sumedang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupten Sumedang pada tahun sebelumnya.

Dan selanjutnya adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Minat Investor di Sumedang. Untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung Capaian kinerja jumlah investasi sumedang Tahun 2022 sebesar Rp 675.000.000,- terdiri dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 275.000.000,- dan Program Promosi Penanaman Modal Sebesar Rp 400.000.000,00 sampai dengan Semester I Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 77.864.490,- atau sebesar 11,54%

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Jumlah Realisasi Investasi di Sumedang Semester I Tahun 2022

Program	Anggaran	Reallsasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	275.000.000,-	33.966.050,-	12,36
Program Promosi Penanaman Modal	400.000.000,-	43.898.440,-	10,97
Jumlah Total	675.000.000,-	77.864.490,-	11,54

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Jumlah Investasi di Sumedang sampai dengan Semester I Tahun 2022 belum bisa diukur.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Jumlah Investasi di Sumedang sampai dengan Semester II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang				Belum bisa diukur

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang capaian kinerja jumlah nilai investasi di Sumedang, yaitu :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berupa penyusunan perubahan Perbup pemberian insentif penanaman modal, Kepbup tentang tim penilai pemberian insentif dan kemudahan PM dan SOP pemberian insentif dan kemudahan PM, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten Kota berupa evaluasi RUPM dan penyusunan data potensi investasi khususnya Kawasan Industri BUTOM)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peta potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah.
- Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis.
- Implementasi kebijakan pembenan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai upaya peningkatan daya Tarik investasi daerah

Solusi/rekomendasinya adalah :

- Dilakukan penyusunan data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah dengan berkoordinasi dengan Bappppeda dan SKPD Teknis.
- Penyusunan studi kelayakan potensi investasi unggulan daerah
- Melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sumedang

2) Program Promosi Penanaman Modal

(Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota berupa kegiatan Pameran potensi investasi pada even APKASI Expo 2022 dan promosi potensi investasi melalui berbagai media elektronik dan media sosial)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
- Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi

Solusi/rekomendasi yaitu :

- Koordinasi dengan SKPD teknis dan bidang Perencanaan dan Pengambanagan Iklim Penanaman Modal untuk memperoleh data peluang penanaman modal
- Penyusunan dokumen strategi promosi investasi di Kabupaten Sumedang.

2) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey dilakukan oleh DPMPPTSP Kabupaten Sumedang sebagai Lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survey dilakukan secara tetap dengan jangka waktu tertentu, survey dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan. Pengumpulan data responden dilakukan melalui aplikasi SI ICE MANDIRI (Non Usaha) dan Pelayanan Pendampingan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS RBA).

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja*

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 88,31 poin dan realisasinya berdasarkan hasil survey Selama Semester I Tahun 2022 sebesar 84,24 poin atau sebesar 95,39%. Target Kinerja tidak tercapai.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	poin	88,31	84,24	95,39	Sangat Tinggi

b. *Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya*

Realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022 sebesar 84,24 poin atau terealisasi sebesar 95,39% dibandingkan target 88,31 poin, dibandingkan Tahun 2021 terealisasi sebesar 86,09 poin atau sebesar 98,69% dari target sebesar 87,23 poin.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I
Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	poin	87,23	86,09	98,69 %	88,31	84,24	95,39%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam RENSTRA Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, target jangka menengah Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan adalah sebesar 90,00 point dan realisasi Semester I Tahun 2022 sebesar 84,24 poin, dengan demikian dibandingkan dengan capaian kinerja jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat adalah terealisasi sebesar 93,6%

Tabel 3.10
Perbandingan Reralisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II
Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

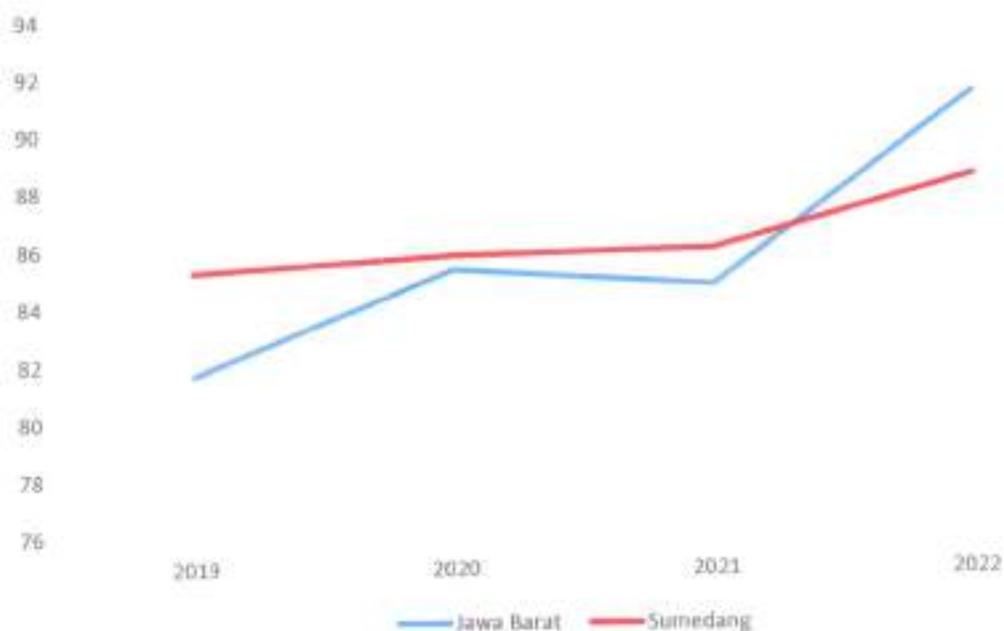
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	90,00	84,24	93,6%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2019 capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,25 poin, Tahun 2020 terealisasi sebesar 85,86 poin, Tahun 2021 terealisasi sebesar 86,09 point dan sampai dengan Semester I Tahun 2022 capaian indeks Kepuasan masyarakat bidang perizinan terealisasi sebesar 84,24 poin.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 81,68%, Tahun 2020 sebesar 85,36%. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 terealisasi sebesar 85,84% dengan peringkat Mutu Pelayanan "B" atau kategori Kinerja Pelayanan "BAIK", Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Untuk tahun 2022 kinerja pelayanan publik yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terdefinisi sangat baik hal ini dikuatkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dengan nilai 91,52. Dalam lima tahun terakhir nilai IKM DPMPTSP Provinsi Jawa Barat secara konsisten mengalami peningkatan.

Grafik 3.2
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang
dengan Provinsi Jawa Barat.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I tahun 2022 sebesar 88,31 dan realisasinya 84,24 atau capaian kinerja sebesar 95,39%. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Target kinerja tercapai.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang dilaksanakan melalui 9 unsur pelayanan yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan unsur sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sampai dengan semester I Tahun 2022 kepada 330 pengguna layanan sebagai responden diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13

Hasil survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022

a. Izin Non Usaha (SI ICE MANDIRI)

No.	UNSUR LAYANAN	NILAI RAT-RATA
1	Persyaratan	3,330
2	Prosedur	3,363
3	Waktu Pelayanan	3,246
4	Biaya/tarif	3,673
5	Produk layanan	3,330
6	Kompetensi Pelaksana	3,335
7	Perilaku Pelaksana	3,307
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,720
9	Sarana dan Prasarana	3,330
	Nilai Unit Pelayanan	84,24 (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan menunjukkan nilai BAIK, yang memiliki hasil penilaian responden tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 3,673

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun atau mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam rangka meningkatkan mutu layanan lebih cepat dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara periodik, sebagai upaya memberi peran yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Semester I Tahun 2022 sebesar Rp 888.914.000,- sampai dengan Semester I Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 220.428.219,- atau sebesar 24,80%

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	330.000.000,-	81.072.049,-	24,57
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.914.000,-	118.861.670,-	25,90
3. Program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal	100.000.000,-	20.494.500,-	20,49
Jumlah Total	888.914.000,-	220.428.219,-	24,80

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022 belum bisa diukur.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan				Belum bias diukur

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yaitu :

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu datu pintu dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah turunannya terdapat peralihan aplikasi pelayanan perizinan dari Aplikasi SI ICE MANDIRI ke OSS RBA, khususnya untuk IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menuntut adanya penyesuaian Peraturan Daerah.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online.

Solusi yang akan dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Peraturan Daerah pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Pemberian layanan jemput bola ke tempat-tempat pelayanan dan keramaian masyarakat dan Peningkatan publikasi layanan melalui media sosial dan website

- 2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya database jumlah investor Sumedang yang wajib LKPM
- Belum seluruh investor mengetahui kebijakan mengenai kewajiban menyampaikan LKPM
- Kemampuan investor untuk melaporkan LKPM sangat terbatas

Solusi atas kendala tersebut yaitu

- Penyusunan Database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM
- Sosialisasi melalui berbagai media mengenai kebijakan LKPM
- Pelatihan mengenai Aplikasi LKPM kepada investor

- 3) Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal (Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum ada analisis data mengenai capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang.

Solusi yang akan dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan analisis data capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang yang dapat menggambarkan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, permasalahan dan rekomendasi.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 39,52%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Semester I Tahun 2022

Sasaran Strategis		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.478.068.900,-	3.670.741.450,-	43,29	4.807.327.450,-
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,-	22.130.250,-	63,22	12.869.750,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000,-	0	0	8.000.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,-	0	0	10.000.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,-	0	0	6.000.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.500.000,-	0	0	6.500.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.000.000,-	21.251.750,-	22,37	73.748.250,-
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor	5.691.068.900,-	2.556.426.206,-	44,91	3.134.642.694,-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	22.500.000,-	12.519.460,-	55,64	9.980.540,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,-	27.541.460,-	55,08	22.458.540,-
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000,-	3.000.000,-	8,57	32.000.000,-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,-	6.000.000,-	50	6.000.000,-
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.000.000,-	82.460.970,-	49,37	84.539.030,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.560.000,-	44.400.000,-	41,66	62.160.000,-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.059.500,-	21.802.800,-	34,03	42.256.700,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.595.000,-	15.000.000,-	43,35	19.595.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.402.000,-	30.758.942,-	36,44	53.643.058,-
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH				

Sasaran Strategis		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.683.500,-	16.430.000,-	31,18	36.253.500,-
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,-	141.468.612,-	56,58	108.531.388,-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.531.388,-	7.084.000,-	4,42	152.916.000,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.600.000,-	515.994.000,-	40,23	766.606.000,-
		KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
		Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.100.000,-	112.323.000,-	47,77	122.777.000,-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,-	34.150.000,-	48,78	35.850.000,-
	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	275.000.000,-	33.966.050,-	12,35	241.033.950,-
		KEGIATAN PENETAPAN				

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000,-	19.859.000,-	39,71	30.141.000,-
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25.000.000,-	4.256.800,-	17,02	20.743.200,-
	KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000,-	9.850.250,-	4,92	190.149.750,-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	400.000.000,-	43.898.440,-	10,97	356.101.560,-
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	50.000.000,-	7.240.000,-	14,48	42.760.000,-
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	350.000.000,-	36.658.440,-	10,47	313.341.560,-

Sasaran Strategis		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Daerah Kabupaten/Kota				
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	330.000.000,-	81.072.049,-	24,56	248.927.951,-
		KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	285.000.000,-	68.371.499,-	23,98	216.628.501,-
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	45.000.000,-	12.700.550,-	28,22	32.299.450,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	458.914.000,-	118.861.670,-	25,90	340.052.330,-
		KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Sasaran Strategis		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	458.914.000,-	118.861.670,-	25,90	340.052.330,-
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,-	20.494.500,-	20,49	79.505.500,-
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	100.000.000,-	20.494.500,-	20,49	79.505.500,-
		JUMLAH TOTAL	10.041.982.900,-	3.969.034.159,-	39,52	6.072.948.741,-

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 90,78%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.974.793,086	1.936.919.233	98,08	37.873.853	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	295.614.550	276.867.760	93,66	18.746.790	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.339.254,220	1.320.523.463	98,60	18.730.757	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.400,000	12.400,000	100	-	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	150.699,316	150.686,510	99,99	12.806	
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	41.700,000	41.316,500	99,08	12.806	
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	60.000,000	60.000,000	100	0	
		Penyediaan Jasa Kebersihan	55.125,000	55.125,000	100	0	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.538.833,480	1.533.098.605	99,63	5.734.875
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	951.674,630	948.733,755	99,69	2.940.875
			Pemeliharaan Rutin/Berkala	346.668,000	346.118,000	99,84	550.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Gedung Kantor				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	196.490.850	194.246.850	98,86	2.244.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	44.000.000	44.000.000	100	0
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	306.900.900	301.920.623	98,38	4.980.277,00
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.250.000	5.250.000	100	0
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.935.714	102.870.714	92,73	8.065.000
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	94.809.764	56.809.765	87,66	8.000.000
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	46.125.950	46.060.950	99,86	65.000
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	40.615.870	40.615.870	100	0
		Penyusunan Perencanaan dan	40.615.870	40.615.870	100	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penganggaran SKPD				
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	26.648.300	17.648.300	66.32	9.000.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	26.648.300	17.648.300	66.32	9.000.000
	Nilai Investasi di Sumedang	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	642.185.265	17.648.300	66.23	452.902.715
		Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal	56.008.140	29.433.100	52.55	26.575.040
		Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal	147.960.150	146.610.150	99.09	1.350.000
		Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang	438.216.975	13.239.300	3.02	424.977.675
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	717.164.000	687.492.400	97,35	29.671.600,00
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	236.782.500	236.114.000	99.72	668.500
		Pemutakhiran Data Perizinan	56.569.125	56.554.350	99.97	14.775
		Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik	48.200.000	47.500.000	98.55	700.000
		Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	466.730.025	460.985.500	98.77	5.744.525

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL	565.296.055	547.704.600	98,77	17.591.455,50
		Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal Dan Perizinan	273.308.200	268.898.950	98,39	4.409.250
		Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	170.384.205	159.037.000	93,34	11.347.205,50
		Penyusunan Elektronik Promotion And Investment System (Epis)	121.603.650	119.768.650	98,49	1.835.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	172.274.364,30	167.672.450	97,33	4.601.914,30
		Pengelolaan Data Dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Ptsp	53.823.200	49.323.200	91,64	4.500.000
		Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.451.164	118.349.250	99,91	101.914,30
		JUMLAH TOTAL	5.885.113.784	5.342.216.172	90,78	542.897.612,80

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Semester I Tahun 2022 rata-rata sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang sebesar 9,96%.
- 2) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan sebesar 95,39%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja sampai dengan Semester I tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan di DPMP TSP untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor
- 2) Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis
- 3) Investasi yang berfokus pada hilirisasi, green economy, dan digitalisasi
- 4) Regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN SUMEDANG, /



ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670918 198703 1 003

